

**Evaluasi Program Sekolah Binaan
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
Propinsi Papua**

Oleh:
Eko Pumomo Tunyanan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Propinsi Papua yang mencakup: relevansi materi; partisipasi peserta; kualitas pelaksanaan; kemanfaatan; dan kesiapan widyaiswara.

Penelitian evaluatif ini menggunakan model Stake. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, kepala seksi peningkatan sumber daya pendidikan, staf, dan widyaiswara LPMP. Fokus penelitian adalah pelaksanaan program. Data dikumpulkan melalui angket, kaji dokumen, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: materi binaan sangat relevan dengan kebutuhan sekolah; partisipasi guru tinggi; kualitas pelaksanaan sangat baik; program bermanfaat; dan kesiapan widyaiswara dalam melaksanakan program masuk kategori baik.

Kata kunci: *evaluasi, model pembinaan sekolah.*

Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Kualitas pendidikan dilihat dari aspek efisiensi dan prestasi belajar peserta didik belum optimal. Pada tahun 2003/2004 ada sebanyak 702.066 siswa terpaksa putus sekolah di jenjang SD.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan, seperti mutu dan perilaku guru, kurikulum dan proses belajar, serta sistem

penilaian. Kemampuan mengajar guru dinilai sebagai kendala utama bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Masih cukup banyak guru yang tidak layak mengajar (Subijanto, 2006: 486). Upaya perbaikan kualitas pendidikan telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai cara, di antaranya peningkatan mutu guru, dana *block grant* peningkatan mutu, perubahan kurikulum, pengangkatan guru bantu, serta monitoring dan evaluasi ke sekolah.

Peningkatan mutu guru, selain melalui penataran dan latihan juga melalui supervisi dalam proses belajar mengajar. Pengembangan profesionalisme dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan mengajar guru. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik yang diupayakan oleh guru-guru sendiri maupun yang diupayakan oleh kepala sekolah dan pengawas. Namun, kurangnya jumlah tenaga guru sekolah negeri ataupun swasta yang belum memiliki guru tetap yaitu guru 981.476 orang dari jumlah ideal 1.157.682 menyebabkan sekolah mengangkat guru tidak tetap dengan honor yang relatif rendah sehingga kontribusinya terhadap proses pembelajaran siswa dirasakan belum optimal.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ketentuan umum bab I pasal 1 nomor 24, dijelaskan bahwa LPMP sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan yang berkedudukan di propinsi bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah tersebut memberikan suatu *licence to drive* bagi LPMP dalam upaya penjaminan mutu.

LPMP perlu melaksanakan *partnership* yang baik dengan dinas pendidikan propinsi, kabupaten, dan kota. Hubungan kerja sama dapat diwujudkan melalui supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis yang dilakukan dalam suatu model yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Model *partnership* tersebut belum dimiliki sepenuhnya oleh sistem

pendidikan Indonesia. Studi banding, *benchmark*, dan transfer pengetahuan yang lebih mendalam perlu dilaksanakan.

Secara teknis dan operasional lembaga itu memiliki tugas pokok dan fungsi mengendalikan mutu pendidikan dan pelatihan di daerah masing-masing bertugas mengeliminasi terjadinya disparitas kualitas proses dan produk pendidikan dan pelatihan di semua jenis dan jenjang antarwilayah. LPMP diharapkan dapat membawa pengaruh dalam *educational reform, educational public accountability, educational public transparency, dan lending acces*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program sekolah binaan di LPMP Propinsi Papua. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keunggulan, kelemahan, dan seberapa jauh tujuan program dapat tercapai sebagai dasar membuat kebijakan selanjutnya. Program sekolah binaan yang dimaksud di sini yaitu sistem pembinaan guru oleh widyaiswara LPMP. Program tersebut diarahkan pada upaya kinerja sekolah dengan memberikan pembinaan teknis dan manajerial yang aspeknya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Worthen & Sander (1973: 129) menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Fernandes (1984: 1) mendefinisikan "*evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are being realized*".

Evaluators tidak hanya menanyakan perubahan, cara yang dipakai, tetapi juga mengapa suatu program itu berhasil atau efektif dan yang lain tidak. Untuk menjawab pertanyaan itu di dalam evaluasi hendaknya dipertanyakan: (1) hal-hal yang diberikan pelayanan dengan program berhasil atau gagal dalam program itu sendiri, (2) populasi yang diberikan pelayanan dengan program itu merasakan ada hasilnya atau tidak, (3) konteks situasi tempat program dilaksanakan termasuk sikap kecurigaan, pendapat masyarakat, lokasi, program lain yang sejenis, (4) macam-macam dampak yang berbeda yang dihasilkan oleh program seperti aspek kognitif, sikap, perilaku, tunggal atau hasil majemuk, jangka pendek atau jangka panjang dan termasuk efek negatif sampingan atau yang tidak diharapkan dan direncanakan. Weiss (1972: 4) mengatakan ada empat hal tujuan dan kegunaan penelitian evaluasi yaitu: (1) *to measure*, mengukur hal-hal yang

berkaitan keterlaksanaan suatu program, (2) *the effects*, menekankan pada dampak program, (3) penggunaan kriteria untuk menilai apakah program berjalan dengan baik, (4) kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan peningkatan perencanaan program dimasa mendatang menunjuk pada tujuan evaluasi (*purpose of evaluation*).

Kompetensi Guru

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003: 5). Finch & Crunkilton (1992: 254) mengatakan bahwa "*Competencies are those tasks, skills, attitudes, values, and appreciations that are deemed critical to succes in life or in earning a living*". Pernyataan ini mengandung makna bahwa kompetensi meliputi tugas, keterampilan, sikap, nilai, apresiasi diberikan dalam rangka keberhasilan hidup atau penghasilan hidup.

Standar kompetensi Guru SD meliputi akademik yang mencakup aspek: (a) penguasaan materi pelajaran; (b) metode dan pendekatan pembelajaran; (c) teknik penilaian, pada ke lima mata pelajaran, yaitu kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ilmu sosial, sains, dan matematika (Depdiknas, 2002: 3). Komponen tersebut merupakan prasyarat kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang guru sehingga secara profesional mampu mengelola proses belajar mengajar di SD.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun terdiri atas program pendidikan enam tahun di sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Ada beberapa jenis sekolah dasar (SD) di Indonesia, yaitu SD Konvensional, SD Percobaan, SD Inti, SD Kecil, SD Satu Guru, SD Pamong, dan SD Terpadu. Di SD, kegiatan belajar mengajar ditekankan pada pembinaan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*). Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan tiga kemampuan dasar yang pertama kali harus diperkenalkan dan ditanamkan kepada siswa sekolah dasar.

Tugas pokok guru SD (Ibrahim, 2000: 33), yaitu (1) menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar bagi pencapaian pembelajaran secara optimal, (2) membina perkembangan peserta didik secara utuh sebagai individu maupun masyarakat, dan (3) melaksanakan tugas-tugas profesional lain dan administrasi rutin yang mendukung tugas pokok pada poin (1) dan (2), untuk melaksanakan tugas pokok tersebut guru perlu memiliki kompetensi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah binaan Lembaga Penjamin Mutu Propinsi Papua. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (angket), dokumentasi, dan wawancara. Sesuai dengan tujuan, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan model Stake. Model ini menekankan pada pengukuran pelaksanaan program dengan standar yang telah ditentukan.

Analisis faktor di dalam penelitian evaluasi ini dilakukan dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 12.0 for windows. Teknik analisis data yang digunakan dalam evaluasi ini adalah analisis evaluatif yang dilakukan dengan mendiskripsikan dan memaknai data dari masing-masing komponen yang dievaluasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan.

Hasil Penelitian

Analisis data dalam penelitian terhadap komponen evaluasi pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Propinsi Papua adalah:

Berdasarkan hasil analisis data variabel relevansi materi pelaksanaan dalam program sekolah binaan oleh LPMP Propinsi Papua, diketahui *mean* = 31,40; skor tertinggi ideal yang dicapai adalah = 36; skor minimum ideal yang dicapai adalah = 24; dengan *mean* ideal (M_i) = 30 dan simpangan baku ideal (S_{bi}) = 2. Hasil analisis mengategorikan: sangat relevan sebesar 23

orang (43,30%); relevan sebesar 12 orang (52,80%); cukup relevan sebesar 2 orang (3,80%); dan kurang relevan tidak ada (0,00%).

Berdasarkan hasil analisis data komponen partisipasi guru sekolah dasar dalam pelaksanaan program sekolah binaan oleh LPMP Propinsi Papua, diketahui $mean = 14,30$; skor tertinggi ideal yang dicapai adalah $= 16$; skor minimum ideal yang dicapai adalah $= 12$; dengan $mean$ ideal (M_i) $= 14$; dan simpangan baku ideal (S_{bi}) $= 0,67$. Hasil analisis mengategorikan: tinggi sebanyak 49 orang (92,40%); kategori sedang sebesar 4 orang (7,50%); kurang tidak ada (0,00%).

Berdasarkan hasil analisis data komponen kualitas pelaksanaan program sekolah binaan oleh LPMP Propinsi Papua terhadap sekolah binaan, diketahui $mean = 24,74$; skor tertinggi ideal yang dicapai adalah $= 28$; skor minimum ideal yang dicapai adalah $= 16$; dengan $mean$ ideal (M_i) $= 22$, dan simpangan baku ideal (S_{bi}) $= 2$. Hasil analisis mengategorikan: sangat baik sebesar 34 orang (64,10%); kategori baik sebesar 16 orang (30,10%); sedang sebesar 2 orang (3,80%); dan kurang baik sebesar 1 orang (1,90%).

Berdasarkan hasil analisis data komponen kemanfaatan program sekolah binaan oleh LPMP Propinsi Papua terhadap sekolah binaan, diketahui $mean = 18,13$; skor tertinggi ideal yang dicapai adalah $= 20$; skor minimum ideal yang dicapai adalah $= 14$; dengan $mean$ ideal (M_i) $= 17$; dan simpangan baku ideal (S_{bi}) $= 0,67$. Hasil analisis mengategorikan; bermanfaat sebesar 51 orang (96,20%); cukup bermanfaat sebesar 2 orang (3,80%); dan kurang bermanfaat tidak ada (0,00%).

Analisis data dalam penelitian pada komponen kesiapan widyaiswara LPMP Propinsi Papua dalam melaksanakan program sekolah binaan diketahui $mean = 39,42$; skor tertinggi ideal yang dicapai adalah $= 50$; skor minimum ideal yang dicapai adalah $= 26$; dengan $mean$ ideal (M_i) $= 38$; dan simpangan baku ideal (S_{bi}) $= 4$. Hasil analisis mengategorikan: sangat siap tidak ada (0,00%); kategori siap sebesar 7 orang (58,30%); dan cukup siap sebesar 4 orang (33,40%); kurang siap tidak ada (0,00%).

Pembahasan

Hasil evaluasi program sekolah binaan di LPMP Propinsi Papua dapat dibahas sebagai berikut:

Materi program sekolah binaan LPMP Propinsi Papua sangat relevan dengan kebutuhan sekolah, dari jumlah responden (guru) 53 orang: sebanyak 41 orang (77,30%) cenderung sangat relevan dan relevan sebanyak 12 orang (22,70%). Berdasarkan uraian di atas, relevansi materi pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Propinsi Papua termasuk baik. Hal ini disebabkan karena adanya analisis kebutuhan terhadap program binaan untuk masing-masing sekolah, sehingga pada saat melakukan pembinaan dapat sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Partisipasi peserta (guru) dalam pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Papua dikategorikan tinggi, dari responden (guru) 53 orang: sebanyak 49 orang (70,35%) dan dinyatakan partisipasinya tinggi dan sebesar 4 orang (7,50%) dinyatakan partisipasinya sedang. Hal ini disebabkan rasa ingin tahu guru terhadap perubahan kurikulum, dan guru kurang mendapat pelatihan. Dengan demikian, partisipasi guru sekolah dasar dalam pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Propinsi Papua dikategorikan baik.

Kualitas pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Papua dari jumlah responden (guru) 53 orang yang menyatakan sangat baik sebanyak 32 orang (64,10%); baik sebanyak 16 orang (30,10%); sedang 2 orang (3,80%); kurang 1 orang (1,90%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Provinsi Papua dikategorikan baik. Hal ini disebabkan adanya koordinasi dalam melihat kebutuhan guru dalam menunjang proses belajar mengajar.

Kemanfaatan program dalam pelaksanaan sekolah binaan LPMP dari responden (guru) 53 orang: yang menyatakan bermanfaat sebanyak 51 orang (96,20%) dan cukup bermanfaat 2 orang (3,80%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Papua masuk pada kategori bermanfaat. Hal ini dikarenakan guru merasa kebutuhan proses belajar mengajar dalam mendukung tugasnya terpenuhi melalui program pembinaan.

Kesiapan widyaiswara LPMP Propinsi Papua dalam melaksanakan program sekolah binaan dari jumlah keseluruhan responden 12 orang: sebanyak 7 orang (58,30%) dikategorikan siap; 4 orang (33,40%) dikategorikan cukup siap; dan kurang siap sebanyak 1 orang (8,30%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesiapan widyaiswara LPMP Propinsi Papua dalam melaksanakan program sekolah binaan termasuk pada kategori siap. Hal ini disebabkan pada komitmen awal LPMP bersama kepala sekolah dan guru, dalam melihat kebutuhan yang menjadi skala prioritas dalam proses belajar mengajar sehingga LPMP dapat menyiapkan materi sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut.

Data kualifikasi guru sekolah binaan LPMP propinsi Papua yang berlatar belakang pendidikan KPG/KPA 23 guru, SGO/SPG/SMA 4 guru, D1 3 guru, D2 43 guru, dan D3 3 guru. Guru SD binaan yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik berjumlah 76 guru. Beberapa temuan tentang guru yang belum memenuhi kualifikasi yaitu: mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari birokrasi, adanya pemotongan gaji mereka yang kecil, sulitnya mengurus kenaikan pangkat yang menjadi haknya. Kapan harus mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat, kapan dipromosikan menjadi wakil/kepala sekolah, tingkat kesejahteraan masih sangat rendah dan tidak sesuai dengan beban tugas yang dipikulnya, dan kelompok usia membuat pemenuhan kualifikasi, profesionalisme menjadi menurun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Materi program sekolah binaan LPMP Propinsi Papua sangat relevan dengan kebutuhan sekolah.
2. Partisipasi peserta (guru) dalam pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Papua dikategorikan tinggi.
3. Kualitas pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Papua dikategorikan sangat baik.

4. Kemanfaatan program dalam pelaksanaan program sekolah binaan LPMP Papua dikategorikan bermanfaat.
5. Kesiapan widyaiswara LPMP Propinsi Papua dalam melaksanakan program sekolah binaan dikategorikan siap.

Daftar Pustaka

- Finch, C. R & Crunkilton, J. R. (1992). *Curriculum development in vocational and technical educational. Planning, content and implementation*. Fourt Edition. Virginia: Polytechnic Institute and State University.
- Ibrahim Bafadal. (2004). *Peningkatan profesionalisme guru sekolah dasar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah. (1990). *Peraturan Pemerintah, Nomor 28, tentang Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul*.
- Sudarsono, F. X. (1994). *Penelitian evaluasi*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Sumarno. (1995). *Potensi sekolah unggul sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan*. Yogyakarta: Lembaga penelitian IKIP Yogyakarta.
- Weiss, Carol R (1972). *Evaluation research*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Worthen, B. R. & Sanders, J. R. (1973). *Educational evaluation: Theory and practice*. Washington: Charles A. Jones Publishing company.

Biodata Penulis

Eko Purnomo Tunyanan. Lahir di Manokwari 13 September 1965. Menyelesaikan pendidikan D-3 Jurusan Ilmu Pendidikan Bimbingan Konseling Universitas Cenderawasih Tahun 1987, S-I Jurusan Ilmu Pendidikan Bimbingan Konseling Universitas Cenderawasih Tahun 1997. Pendidikan S2, di Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2007.